



Pencairan BLSM Harus Sertakan Surat Pernyataan

YOGYA (KR) - Proses pencairan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada hari kedua, Senin (24/6) kemarin, masih ditemui berbagai persoalan teknis. Terutama warga yang terpaksa harus menunda pencairan lantaran data dalam Kartu Perlindungan Sosial (KPS) berbeda dengan kartu identitas.

Sebagian besar, perbedaan data tersebut menyangkut alamat tempat tinggal. Hal ini lantaran warga miskin yang sudah berganti KTP namun domisili masih tetap. Salah satunya Kamilah yang tinggal di Gondomanan dan mendapatkan KPS namun KTP nya beralamatkan Temanggung Jawa Tengah. "Saya sudah sembilan tahun tinggal disini. Alamat di KPS tertulis Gondomanan, jadi berbeda dengan yang ada di KTP," akunya.

Selain Kamilah, masih ada puluhan warga yang mengalami persoalan serupa. Bahkan tidak hanya

perbedaan alamat dalam KPS dengan KTP, ada juga yang ejaan namanya berbeda.

Oleh petugas Kantor Pos, warga yang datanya berbeda dengan KPS diminta membawa surat pernyataan atau keterangan. Menurut Manajer Supervisi Pelayanan Pelanggan Kantor Pos Besar Yogyakarta, MP Simatupang, patokan utama pencairan BLSM ialah kepemilikan KPS.

Sebelum dicairkan, warga pemegang KPS kartu identitas yang masih berlaku. Hal ini guna mencocokkan atau validitas pemegang KPS. Sehingga, jika terdapat perbedaan data, maka wajib dilengkapi dengan surat pernyataan. "Kalau alamatnya berbeda, maka ada keterangan dari perangkat RT, RW atau lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar warga setempat," tandasnya.

Begitu juga jika pengambilan

BLSM diwakilkan oleh anggota keluarga. Maka, wajib disertai dengan surat kuasa bermeterai dan ditandatangani oleh orang yang namanya tercantum sebagai penerima KPS. Langkah tersebut dilakukan supaya penyaluran BLSM tepat sasaran sesuai dengan KPS.

Oleh karena itu, perangkat pemerintah daerah diminta proaktif dalam melakukan sosialisasi kepada warganya yang menerima KPS. Pasalnya, BLSM merupakan program pemerintah pusat dan harus didukung oleh pemerintah daerah.

Sementara Lurah Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen, Hery Eko Prasetyo mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi secara maksimal kepada warganya. Jika terdapat warga tidak bisa mengambil BLSM sesuai jadwal yang sudah disusun Kantor Pos, sebenarnya tak perlu dipersoalkan. **(R-9)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Sosromenduran			

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005